

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

Gender sering dilupakan dalam pembahasan konflik yang hanya memusatkan pada laki-laki dan tidak mempertimbangkan pengalaman dan sudut pandang gender lain yang juga berada dalam situasi konflik, salah satunya perempuan. Sekali keberadaan perempuan diakui, yang tercetus adalah perempuan sebagai korban, bukan sebagai agen perdamaian. Akibatnya, ketidakamanan perempuan dalam situasi konflik tidak diakomodasi. Begitulah yang terjadi pada perempuan Myanmar selama perang sipil di bawah rezim militer berlangsung. Kasus KSBG menyasar perempuan Myanmar yang digunakan sebagai instrumen dalam konflik dan penindasan yang sistematis oleh *Tatmadaw*.

Sebagai negara yang mengalami konflik selama 60 tahun, Myanmar belum memiliki RAN Resolusi 1325 tahun 2000 yang berisi tentang prosedur para pihak dalam konflik untuk mencegah pelanggaran hak-hak perempuan, melindungi perempuan dalam konflik, dan untuk mendukung partisipasi perempuan dalam proses perdamaian. Padahal Afganistan, Sudan Selatan, dan Yaman sebagai contoh negara yang sedang berkonflik sudah mengadopsi RAN Resolusi 1325. Untuk melindungi hak-hak perempuan, Myanmar masih menggunakan NSPAW 2013 berdasarkan pada *Beijing Platform* tahun 1995.

Kondisi perempuan di Myanmar di tengah rezim militer dan perang sipil tanpa adanya kerangka yang menjamin keamanan mereka menarik untuk diteliti. Penelitian ini bermaksud menjelaskan alasan Myanmar lamban mengadopsi RAN Resolusi 1325 sebagai implementasi agenda WPS dengan limitasi periode dari tahun 2011 sampai tahun 2022 menggunakan teori *Feminist Institutionalism* (FI) dan konsep *Feminist Security Studies* (FSS) untuk menambah keragaman literatur studi Keamanan dalam lensa feminisme. Alasan lambannya adopsi Resolusi 1325 sebagai implementasi agenda WPS di Myanmar disebabkan oleh dua faktor.

Pertama, terjadi regresi rezim gender di institusi Myanmar dari rezim *feminist presence and masculinist backlash* ke rezim *masculine hegemony* yang

menunjukkan pemerintahan Myanmar tahun 2011-2022 belum cukup ramah menginternalisasi isu gender, sehingga tidak kondusif untuk mengadopsi RAN Resolusi 1325. Rezim *feminist presence and masculinist backlash* adalah pemerintahan transisi demokrasi 2011-2020 dan rezim *masculine hegemony* adalah pemerintahan militer 2021-2022. Secara *division of labour*, pemerintahan sipil Myanmar menghadirkan partisipasi perempuan ke dalam pembuatan kebijakan. Pasca kudeta 2021, rezim gender ini mengalami regresi menjadi hegemoni maskulin yang menitikberatkan negara sebagai aktor tunggal dalam pembuatan kebijakan. Secara *power and authority*, meskipun kedua rezim gender ini menggunakan pendekatan *top-down*, pemerintahan sipil memberi kesempatan untuk mengakomodasi isu gender melalui aktor non-negara. Pasca kudeta 2021, junta militer menutup semua akses interaksi dan partisipasi aktor non-negara. Secara *emotional relations*, interaksi keduanya tidak ada yang berarti. Secara *symbolisation and representation*, kedua rezim sama-sama dipermainkan aktor maskulin. Pada masa pemerintahan sipil, kehadiran perempuan diposisikan di bagian bawah dan menengah, sehingga hasil kebijakan kurang berperspektif gender. Pasca kudeta 2021, berkaca dari Konstitusi 2008 sebagai produk junta militer, mereka mengucilkan kebutuhan dan kepentingan kelompok perempuan dalam pembuatan kebijakan yang pada akhirnya menghasilkan kebijakan buta gender.

Kedua, posisionalitas junta militer berlawanan dengan norma-norma yang terkandung di dalam Resolusi 1325 yang dianalisis melalui tiga pertanyaan ini. Apa arti keamanan bagi junta militer dapat dilihat dari keamanan negara atau tradisional di mana militerisasi, pesenjataan, angkatan bersenjata menjadi fokus utama mereka, sedangkan Resolusi 1325 menitikberatkan keamanan perempuan. Siapa keamanan bagi junta militer dapat dilihat dari preferensi mereka mengutamakan laki-laki dan anggota militer untuk hadir di segala bidang, khususnya politik dan hukum, sedangkan Resolusi 1325 berusaha untuk mengarusutamakan gender dan mengamankan perempuan dari situasi konflik, seperti penghapusan impunitas. Apa yang menjadi tujuan keamanan junta militer adalah kekuasaan mutlak, di mana pemimpin militer sebagai aktor negara tunggal,

yang mana keamanannya harus sesuai dengan dan semua bidang harus di bawah kontrol pemimpin militer, sedangkan Resolusi 1325 mengajak semua pihak untuk terlibat dalam penyelesaian konflik. Pengamatan pemerintah Myanmar dari implementasi NSPAW 2013 juga mendorong resistensi adopsi RAN Resolusi 1325 karena pemerintah Myanmar semakin terancam akibat organisasi masyarakat sipil perempuan memanfaatkan NSPAW untuk memastikan kepatuhan pemerintah terhadap Rekomendasi Umum CEDAW 30 (GR30), yang berfokus pada perempuan dalam pencegahan konflik, situasi konflik, dan pasca konflik.

#### **4.2 Saran**

Dari hasil penelitian ini, organisasi masyarakat sipil Myanmar disarankan untuk melakukan peningkatan kapasitas tentang lokalisasi dan operasionalisasi Resolusi 1325 secara nasional. Selain itu, penelitian ini memiliki ruang untuk dikembangkan. Pertama, salah satu data penelitian ini berasal dari wawancara daring dengan seorang aktivis perdamaian sipil Myanmar. Jika penelitian selanjutnya dapat mengumpulkan lebih dari satu narasumber serupa dan mewakili beberapa organisasi masyarakat sipil Myanmar, maka temuan penelitian akan semakin beragam. Kedua, penelitian ini juga belum berkesempatan untuk mewawancarai perwakilan dari pihak pemerintah, khususnya militer. Jika penelitian selanjutnya memiliki akses untuk mewawancarai, misalnya purnawirawan militer, kerabat, atau kolega mereka, maka hasil analisis akan lebih akurat karena berasal data primer dari berperspektif pihak pertama.

Ketiga, penelitian ini dapat menjadi penelitian komparatif dengan membandingkan Myanmar dengan negara-negara berkondisi sama yang sudah mengadopsi RAN Resolusi 1325 untuk menjadi masukan bagi penyusun Resolusi 1325 Myanmar dengan mempelajari praktik-praktik baik negara-negara yang sudah memiliki RAN Resolusi 1325 di tengah situasi konflik dan hegemoni maskulin. Terakhir, penelitian ini dapat dilanjutkan untuk menganalisis *Regional Action Plan on WPS* (RAPoWPS) ASEAN yang baru diluncurkan pada Desember 2022 sebagai pedoman Myanmar dalam akselerasi adopsi RAN Resolusi 1325.